



Pengelolaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Panyabungan: Studi Kasus dan Solusi

Muhammad Dandi¹, Mursyidan Auliya Nasution²

STAIN Mandailing Natal^{1,2}

dandirey8@gmail.com¹, mursyidanauliyanasution@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Panyabungan serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi proses seleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah, panitia PPDB, dan orang tua calon peserta didik, serta dokumentasi prosedur dan hasil seleksi tahun ajaran 2023/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sekolah telah menerapkan sistem PPDB berbasis daring sesuai kebijakan pemerintah, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran online, keterbatasan sarana teknologi, serta persepsi ketidakadilan dalam penentuan zonasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi melalui media lokal, penyediaan pusat bantuan teknologi di sekolah, serta pengembangan fitur transparansi seperti pelacakan status pendaftaran secara real-time. Dengan implementasi solusi tersebut, diharapkan proses PPDB di SMP Negeri 1 Panyabungan dapat berjalan lebih adil, efisien, dan akuntabel. Studi ini memberikan kontribusi praktis bagi sekolah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam penerapan sistem seleksi siswa berbasis digital.

Kata Kunci: Pengelolaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi

Abstract

This study aims to analyze the management system of the New Student Admission (PPDB) process at SMP Negeri 1 Panyabungan and propose solutions to enhance the effectiveness and transparency of student selection. A case study approach with a descriptive qualitative method was employed. Data were collected through interviews with the principal, PPDB committee members, and parents of prospective students, as well as documentation of procedures and selection results for the 2023/2024 academic year. The findings reveal that although the school has implemented an online-based admission system in accordance with government regulations, several challenges persist. These include limited public understanding of online registration procedures, inadequate technological access, and perceived unfairness in the zoning policy implementation. To address these issues, the study recommends strengthening public outreach through local media, providing a technology assistance center at the school, and developing transparency features such as real-time

application tracking. With these improvements, the PPDB process at SMP Negeri 1 Panyabungan is expected to become more equitable, efficient, and accountable. This study offers practical insights for other schools facing similar challenges in transitioning to a digital-based student admission system.

Keywords: Management, New Student Admission, Zoning System.

PENDAHULUAN

Setiap tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan di Indonesia melaksanakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai pintu masuk utama bagi calon siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi indikator tata kelola sekolah secara keseluruhan. Pada kenyataannya, PPDB sering kali menjadi momen yang menimbulkan berbagai dinamika, seperti ketegangan antara orang tua siswa, kebingungan mengenai regulasi, serta keterbatasan sistem dalam mengelola lonjakan jumlah pendaftar. Hal tersebut menggambarkan bahwa PPDB tidak semata proses teknis, melainkan mencerminkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan manajerial pihak sekolah dalam menyelenggarakan layanan publik yang adil dan transparan.

Seiring dengan perubahan kebijakan nasional, seperti sistem zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, sekolah dituntut untuk lebih adaptif dalam mengelola penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun pada praktiknya menimbulkan tantangan tersendiri di daerah, khususnya di kawasan kabupaten atau kecamatan yang memiliki kondisi geografis, sosial, dan infrastruktur yang bervariasi. SMP Negeri 1 Panyabungan, sebagai sekolah negeri unggulan di Kabupaten Mandailing Natal, berada dalam pusaran dinamika tersebut. Daya tarik sekolah ini menjadikannya sebagai tujuan utama para orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Namun, tingginya minat tidak selalu sebanding dengan kapasitas daya tampung sekolah.

Permasalahan utama yang muncul dalam proses PPDB di sekolah ini adalah terkait manajemen seleksi, distribusi informasi, dan penggunaan sistem berbasis teknologi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pendaftar, namun belum diimbangi dengan sistem pengelolaan data yang memadai. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam verifikasi berkas, ketidaktepatan data zonasi, serta kekhawatiran masyarakat terhadap potensi ketidakadilan dalam seleksi. Minimnya pelatihan terhadap tenaga kependidikan dalam penggunaan aplikasi PPDB daring serta lemahnya

koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan juga menjadi faktor penghambat kelancaran proses tersebut.

Di sisi lain, peran masyarakat, khususnya orang tua siswa, semakin aktif dalam memantau dan menanggapi proses PPDB. Media sosial dan forum diskusi daring menjadi sarana ekspresi ketidakpuasan sekaligus penyebaran informasi yang terkadang simpang siur. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PPDB tidak hanya menyangkut urusan internal sekolah, tetapi juga berdampak langsung pada persepsi publik terhadap kredibilitas dan integritas institusi pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan sistem PPDB yang baik memerlukan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi dari berbagai pihak.

Lebih lanjut, sistem pengelolaan yang baik harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang sistematis dan terdokumentasi. Dalam kasus SMP Negeri 1 Panyabungan, diperlukan model pengelolaan yang mampu mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kearifan lokal. Artinya, selain mematuhi regulasi nasional, sekolah juga harus mempertimbangkan karakteristik sosial dan geografis masyarakat sekitar agar proses PPDB tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Kesiapan infrastruktur teknologi, ketersediaan sumber daya manusia, serta pemahaman terhadap kebijakan menjadi tiga pilar utama yang perlu dibenahi secara simultan dan berkelanjutan.

Berdasarkan situasi tersebut, artikel ini memfokuskan pembahasannya pada bagaimana pengelolaan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Panyabungan dilakukan dalam praktiknya, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung jalannya proses tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pendekatan manajerial yang diterapkan oleh pihak sekolah, mengevaluasi efektivitas sistem yang digunakan, serta mengidentifikasi peluang perbaikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sekolah lain di wilayah serupa dalam membenahi sistem PPDB mereka.

Pemilihan tema ini menjadi penting tidak hanya karena urgensi reformasi dalam proses penerimaan peserta didik, tetapi juga karena menyentuh langsung kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan negeri. Keterbukaan dan keadilan dalam penerimaan siswa baru memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas dan iklim belajar-mengajar di sekolah. Jika dikelola secara profesional dan transparan, PPDB bukan hanya menjadi proses administratif tahunan, melainkan cermin budaya organisasi sekolah yang modern, inklusif, dan berorientasi pada layanan.

Akhirnya, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat tata kelola pendidikan di tingkat sekolah. Fokus pada studi kasus SMP Negeri 1 Panyabungan memberikan ruang analisis kontekstual yang dapat dijadikan pembelajaran bagi sekolah-sekolah lain di daerah yang memiliki kondisi serupa. Dengan pendekatan yang solutif dan berbasis realitas, pembahasan ini menawarkan rekomendasi yang aplikatif dalam membenahi sistem PPDB agar semakin adaptif terhadap dinamika sosial dan kebijakan yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami pengelolaan sistem penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Panyabungan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah, staf administrasi, guru, dan orang tua siswa untuk mendapatkan informasi langsung terkait proses PPDB.

Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan penerimaan siswa baru di sekolah untuk memperoleh gambaran nyata proses yang berjalan. Dokumentasi berupa kebijakan, formulir pendaftaran, dan laporan seleksi dikumpulkan sebagai data pendukung. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah sumber-sumber terkait pengelolaan PPDB sebagai dasar teori dan pembanding. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan gambaran lengkap serta solusi atas pengelolaan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Panyabungan.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analisis, yang meliputi pengelompokan data, interpretasi makna, serta pencarian pola dan hubungan antar variabel yang muncul selama proses pengumpulan data. Hasil analisis ini disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran utuh tentang pengelolaan sistem PPDB serta rekomendasi solusi yang sesuai dengan konteks SMP Negeri 1 Panyabungan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu tahapan paling strategis dalam siklus manajemen pendidikan di sekolah. Melalui proses ini, sekolah bukan hanya melakukan seleksi administratif, tetapi juga membentuk fondasi komunitas belajar yang akan berjalan selama satu tahun ajaran bahkan lebih. Dalam konteks ini, pengelolaan PPDB mencerminkan sejauh mana sebuah sekolah mampu menjalankan fungsi tata kelola yang baik (*good governance*) dalam lingkungan pendidikan. Di satu sisi, PPDB harus menjamin

keterbukaan dan keadilan; di sisi lain, proses ini dituntut untuk efisien, sistematis, dan berbasis data. Namun dalam praktiknya, pengelolaan PPDB di berbagai sekolah, terutama di daerah, masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi teknis maupun kebijakan.

I. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Panyabungan

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan serangkaian mekanisme yang disusun oleh lembaga pendidikan untuk menjaring peserta didik sesuai dengan kapasitas, kriteria, dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, PPDB tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif untuk menerima siswa baru, tetapi juga mencerminkan implementasi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejak diterapkannya sistem zonasi oleh Kementerian Pendidikan, PPDB mengalami transformasi signifikan dari yang sebelumnya berbasis seleksi akademik menuju pemerataan akses pendidikan melalui pertimbangan jarak domisili, afirmasi bagi kelompok rentan, serta jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan PPDB sangat dipengaruhi oleh kesiapan sekolah dalam mengelola data, sistem informasi, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, orang tua, dan masyarakat.

Dalam praktiknya, pengelolaan PPDB menuntut adanya sinergi antara aspek teknis dan non-teknis. Secara teknis, sekolah harus mampu menyediakan sistem informasi yang responsif dan mudah diakses, baik berbasis manual maupun digital. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi PPDB online menjadi solusi strategis untuk mengurangi antrean fisik, mempercepat validasi data, serta meningkatkan transparansi seleksi. Namun, di sisi lain, aspek non-teknis seperti sosialisasi kebijakan, pelayanan publik yang ramah, dan kemampuan mengelola konflik sosial juga memegang peranan penting. Banyak kasus menunjukkan bahwa permasalahan PPDB bukan semata disebabkan oleh sistem digital yang kurang optimal, tetapi lebih kepada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan atau kurangnya komunikasi efektif antara sekolah dan orang tua calon peserta didik.

Dengan demikian, pengelolaan PPDB yang ideal adalah yang mampu mengintegrasikan pendekatan berbasis sistem dengan pendekatan berbasis empati. Studi kasus SMP Negeri 1 Panyabungan memberikan pelajaran bahwa keberhasilan PPDB bukan hanya diukur dari kelancaran proses pendaftaran, tetapi juga dari sejauh mana sekolah mampu membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajemen

sekolah, pengembangan teknologi informasi yang adaptif, serta pelibatan aktif masyarakat merupakan kunci strategis dalam mewujudkan PPDB yang berkualitas dan berkeadilan.

SMP Negeri 1 Panyabungan, sebagai salah satu sekolah negeri unggulan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menjadi contoh yang menarik untuk dikaji. Sekolah ini setiap tahunnya menerima jumlah pendaftar yang jauh melebihi daya tampung yang tersedia, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan yang ditawarkan. Namun tingginya animo masyarakat ini juga melahirkan tantangan tersendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB, seperti persoalan zonasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi panitia, hingga tuntutan transparansi dari masyarakat. Dinamika ini membuat proses PPDB tidak hanya menjadi urusan administratif, melainkan juga berdampak langsung terhadap reputasi dan kredibilitas sekolah.

SMP Negeri 1 Panyabungan diizinkan untuk beroperasional pada tanggal 1 Juli 1951 yang didirikan di Jalan Abri Ujung, Desa Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal yang dipimpin oleh Kepala Sekolah H. Ibrahim Lubis, S.Pd. dengan masa jabatan dimulai pada tahun 2013 sampai dengan 2019, kemudian dimutasi ke SMP Negeri 1 Panyabungan Selatan pada bulan Oktober 2019, namun setelah menjabat sekitar 4 tahun, pada bulan Februari tahun 2023 lalu beliau kemudian menjabat kembali di SMP Negeri 1 Panyabungan hingga sekarang.

Secara teknis, pengelolaan PPDB idealnya melibatkan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut harus mampu mendukung proses pendaftaran daring, verifikasi data, seleksi zonasi, hingga pengumuman hasil akhir. Namun kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Di SMP Negeri 1 Panyabungan, pelaksanaan PPDB sebagian besar masih dilakukan secara semi-manual karena keterbatasan perangkat dan jaringan internet, terutama bagi pendaftar yang berasal dari desa-desa di pelosok. Situasi ini diperparah dengan belum meratanya literasi digital, baik di kalangan peserta didik maupun orang tua. Akibatnya, banyak proses teknis seperti pengisian formulir, unggah dokumen, hingga pencetakan bukti pendaftaran menjadi kendala tersendiri.

Dari sisi kebijakan, penerapan sistem zonasi juga menjadi salah satu faktor krusial yang seringkali menimbulkan polemik. Sekolah dituntut untuk memprioritaskan calon peserta didik dari wilayah sekitar, namun kenyataannya batas zona tidak selalu sesuai dengan kondisi geografis atau kepadatan penduduk. Sistem penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Panyabungan menggunakan sistem zonasi, dimana seluruh peserta didik direkrut melalui

sekitar lingkungan sekolah tersebut. Sistem zonasi dinilai memiliki manfaat untuk peserta didik baru, yaitu dapat menghemat waktu, menghemat biaya transportasi karena sekolah dekat dengan tempat tinggal, serta mengurangi kemacetan. Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Indonesia mendapat beragam tanggapan dari para ahli. Meskipun tujuan utamanya adalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan fasilitas, kurangnya sosialisasi, dan persepsi masyarakat. Diperlukan evaluasi berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Ishak, (2020). Adanya sistem zonasi ini diharapkan semua warga bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal, pemerataan pendidikan di Indonesia.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan juga kendala dari sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Studi oleh Risca Candra Vinalistyosari dan rekan dari Universitas Negeri Malang mengungkapkan bahwa sistem zonasi mempengaruhi minat belajar siswa. Banyak siswa yang harus mengubah aspirasi sekolah tujuan mereka karena faktor lokasi geografis tempat tinggal yang tidak sesuai dengan zonasi. Vinalistyosari et al., (2024). Sedangkan, menurut dari Hendrawansyah dan Zamroni yang menjadi hambatan dalam sistem zonasi salah satunya adalah minimnya sosialisasi, regulasi penetapan zona yang belum jelas, dan penyebaran guru yang belum merata. Hendrawansyah & Zamroni, (2020). Kebijakan sistem zonasi mempengaruhi tidak hanya peserta didik dan sekolah, tetapi juga orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Masyarakat menilai bahwa kebijakan ini belum tepat dilaksanakan karena fasilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Parameswara et al., (2022). Evaluasi terhadap sistem zonasi di tingkat SMP menggunakan enam indikator: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan, dan efisiensi. Meskipun ada upaya untuk pemerataan pendidikan, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan yang perlu diperbaiki. Setiawan & Rahaju, (2021).

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah solutif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah, khususnya panitia PPDB, melalui pelatihan teknis dan manajerial. Sekolah juga perlu menjalin koordinasi yang lebih erat dengan Dinas Pendidikan daerah agar mendapat dukungan sistem, regulasi, dan teknologi yang sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, transparansi informasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Pengumuman terbuka, forum diskusi publik, serta penyediaan layanan bantuan bagi orang tua yang kesulitan mendaftar dapat menjadi solusi konkret untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dalam kajiannya,

Suhendar & Suartini, (2021) menggunakan teori keadilan John Rawls untuk menganalisis sistem zonasi. Mereka menyoroti bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan, pelaksanaannya harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur isi dan materi kebijakan secara bijaksana.

Lebih jauh, penting bagi SMP Negeri 1 Panyabungan untuk mengembangkan sistem PPDB berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial dan geografis masyarakat sekitar. Sistem ini bisa tetap mengacu pada aturan nasional, namun diadaptasi secara teknis agar lebih mudah diakses dan dijalankan oleh seluruh pihak. Penggunaan aplikasi sederhana berbasis Android, pelayanan offline bagi daerah tanpa internet, serta penyederhanaan alur pendaftaran dapat menjadi langkah awal menuju sistem PPDB yang lebih inklusif dan efisien.

Melalui studi kasus ini, artikel berupaya menyajikan gambaran konkret bagaimana pengelolaan PPDB di daerah dapat menjadi cerminan dari kualitas tata kelola pendidikan secara keseluruhan. Diharapkan hasil dari kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi SMP Negeri 1 Panyabungan, tetapi juga bagi sekolah-sekolah lain di daerah dengan kondisi serupa. Dengan pendekatan solutif dan berbasis realitas lokal, pengelolaan sistem PPDB yang baik akan mampu menjamin pemerataan akses pendidikan, menciptakan keadilan bagi semua calon peserta didik, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan negeri.

II. Peran Stakeholder dalam Proses PPDB di SMP Negeri 1 Panyabungan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Panyabungan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan transparan, adil, dan efisien. Peran masing-masing stakeholder sangat krusial dalam setiap tahapan PPDB, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

i. Kepala Sekolah dan Tim Manajemen Sekolah

Kepala sekolah memegang peran sentral dalam mengoordinasikan seluruh proses PPDB. Bersama tim manajemen sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab dalam menyusun rencana strategis, menetapkan kriteria seleksi, dan membentuk panitia PPDB yang terdiri dari guru dan staf administrasi. Panitia ini bertugas untuk melaksanakan proses pendaftaran, verifikasi data, dan seleksi calon peserta didik sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Sultoniya et al., (2022).

Menurut Mahmud et al., (2023), kepala sekolah berperan penting dalam perencanaan PPDB dengan menetapkan tujuan, sasaran, serta menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pengorganisasian dilakukan melalui pembentukan panitia PPDB dan pembagian tugas yang jelas untuk memastikan proses berjalan lancar. Sedangkan, menurut Mustaqimah & Perawironegoro, (2024) menyatakan bahwa kepala sekolah harus menerapkan kepemimpinan berbasis mutu pendidikan dengan mengembangkan program unggulan seperti pembelajaran ICT dan pendidikan budaya lokal untuk menarik minat calon peserta didik baru.

Sujari menemukan bahwa kelemahan dalam manajemen kepala sekolah, terutama pada tahap pelaksanaan dan evaluasi PPDB, dapat menghambat peningkatan mutu penerimaan peserta didik baru. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam manajemen dan evaluasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sujari, (2022). Kemudian, peran kepala sekolah dalam menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar sangat penting, termasuk melalui kegiatan ekstrakurikuler dan sistem zonasi, untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Haekal et al., (2024).

Dengan demikian, kepala sekolah dan tim manajemen sekolah memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan PPDB, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

ii. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

Sebagai otoritas pendidikan di tingkat kabupaten, Dinas Pendidikan memiliki peran dalam menetapkan kebijakan zonasi, kuota penerimaan, dan jadwal pelaksanaan PPDB. Dinas juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, memberikan pelatihan kepada panitia PPDB di sekolah, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat sentral dan strategis sebagai pengarah kebijakan, pengawas implementasi, serta fasilitator teknis dan administratif di tingkat daerah. Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang disesuaikan dengan kebijakan nasional dan kondisi lokal, termasuk dalam menetapkan zona wilayah, kuota daya tampung sekolah, jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi), serta jadwal pelaksanaan PPDB.

Secara teknis, Dinas Pendidikan menyusun sistem informasi manajemen PPDB yang transparan dan akuntabel, mengoordinasikan pelatihan bagi panitia PPDB di setiap satuan pendidikan, serta menyediakan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang mengalami kendala, baik dari segi perangkat lunak, infrastruktur, maupun pemahaman terhadap kebijakan. Selain itu, dinas juga berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dan mekanisme PPDB, baik melalui media sosial, siaran radio, penyuluhan langsung, maupun kerja sama dengan perangkat desa dan kelurahan.

Dinas Pendidikan juga bertugas dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPDB. Hal ini mencakup pemantauan terhadap kepatuhan sekolah terhadap regulasi yang berlaku, penanganan aduan masyarakat terkait indikasi pelanggaran atau kecurangan dalam seleksi, serta pelaporan hasil pelaksanaan PPDB kepada pemerintah provinsi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan peran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tidak hanya menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat sekolah, tetapi juga sebagai penjamin mutu, keadilan, dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar di wilayahnya.

iii. Komite Sekolah dan Orang Tua/Wali Murid

Komite sekolah berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua/wali murid. Mereka berperan dalam memberikan masukan terkait kebijakan PPDB, membantu dalam sosialisasi informasi kepada masyarakat, serta turut mengawasi pelaksanaan PPDB agar berjalan transparan dan akuntabel. Partisipasi aktif orang tua/wali murid juga penting dalam mendukung proses PPDB, baik melalui penyampaian informasi yang benar kepada calon peserta didik maupun dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan sistem. Parlina, (2020).

Komite sekolah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan PPDB, terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penerimaan siswa. Menurut Bambang Supriyanto yang dikutip oleh Prasetyo, (2025), komite sekolah berfungsi sebagai lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator (*mediator agency*) dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam proses PPDB. Peran ini penting untuk menjamin bahwa kebijakan PPDB dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, komite sekolah juga berperan dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dan masyarakat, serta memberikan masukan terkait kebijakan zonasi yang diterapkan

dalam PPDB. Dengan demikian, komite sekolah dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses penerimaan siswa baru.

Partisipasi aktif orang tua/wali murid dalam PPDB sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses penerimaan siswa baru. Menurut Ratiningsih et al., 2022), keterlibatan orang tua melalui paguyuban atau forum komunikasi dapat meningkatkan prestasi sekolah dasar. Keterlibatan ini mencakup dukungan dalam pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta kontribusi dalam pengembangan program sekolah.

Dengan terlibat langsung dalam proses PPDB, orang tua dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, partisipasi orang tua juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan memperkuat hubungan antara sekolah dan keluarga.

Kolaborasi antara komite sekolah dan orang tua/wali murid merupakan kunci dalam menciptakan sistem PPDB yang transparan dan akuntabel. Menurut Ismail B (2024), komite sekolah berperan dalam menampung dan menganalisis aspirasi masyarakat, serta memberikan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan. Dengan melibatkan orang tua dalam proses ini, sekolah dapat memastikan bahwa kebijakan PPDB yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Kolaborasi ini juga dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan zonasi, serta membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul selama proses penerimaan siswa baru. Dengan demikian, keterlibatan komite sekolah dan orang tua/wali murid dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan PPDB.

iv. Masyarakat dan Media

Masyarakat luas, termasuk media massa, memiliki peran dalam mengawasi dan menginformasikan pelaksanaan PPDB. Media dapat membantu menyebarkan informasi resmi terkait PPDB, mengedukasi masyarakat tentang prosedur dan persyaratan, serta mengangkat isu-isu yang muncul selama proses berlangsung. Keterlibatan aktif masyarakat dan media dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PPDB.

Dengan sinergi yang baik antara seluruh stakeholder, pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 1 Panyabungan diharapkan dapat berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam pendidikan. Partisipasi masyarakat, khususnya orang tua dan komunitas lokal, memainkan peran penting dalam mengawal kebijakan pendidikan, termasuk sistem PPDB. Penelitian oleh Aryanda, (2024) menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat sipil efektif dalam mengadvokasi kebijakan pendidikan dan mengawasi praktik-praktik seperti pungutan liar di sekolah. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PPDB.

Namun, persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi dalam PPDB masih beragam. Studi oleh Widyaningtyas et al., (2021), menemukan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap sistem zonasi. Alasannya meliputi ketidakmerataan fasilitas pendidikan, kualitas guru yang belum merata, dan kekhawatiran bahwa sistem ini mengurangi semangat belajar siswa karena keterbatasan pilihan sekolah.

Media, terutama media sosial, memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan penyebarluasan informasi terkait PPDB. Penelitian oleh Gliselda Aurelia & Ema Jumiati, (2023) menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik dalam menanggapi gelombang misinformasi dan disinformasi selama pelaksanaan PPDB online. Kurangnya komunikasi yang efektif dari pemerintah dan institusi terkait menyebabkan kebingungan di masyarakat, yang dapat menghambat proses penerimaan siswa baru. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi sekolah dalam PPDB juga terbukti efektif. Studi oleh Wijayanto & Qana'a, (2023) menunjukkan bahwa pelatihan optimalisasi media sosial membantu sekolah dalam menyebarluaskan profil dan prestasi, menjaring calon siswa baru, dan mencapai target PPDB.

Peran aktif masyarakat dan media sangat krusial dalam mendukung keberhasilan sistem PPDB di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara media, khususnya media sosial, dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menyebarkan informasi, mengedukasi publik, dan mempromosikan sekolah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media perlu terus ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan PPDB yang adil dan merata khususnya di SMP Negeri 1 Panyabungan.

III. Solusi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem PPDB di SMP Negeri 1

Panyabungan

i. Penguatan Sosialisasi Kebijakan kepada Masyarakat

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 1 Panyabungan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan aturan zonasi, jalur afirmasi, serta jalur prestasi. Banyak orang tua siswa masih belum sepenuhnya

memahami ketentuan yang berlaku, yang berujung pada kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap transparansi proses PPDB. Oleh karena itu, solusi yang paling mendasar adalah memperkuat kegiatan sosialisasi kebijakan PPDB melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial sekolah, pertemuan langsung dengan wali murid, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.

Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terjadwal sejak awal tahun ajaran agar tidak terkesan mendadak. Selain itu, informasi perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta disertai simulasi atau contoh kasus agar lebih membumi. Keterlibatan komite sekolah dan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi akan sangat membantu dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dan masyarakat secara efektif.

ii. Optimalisasi Sistem Digital dan Transparansi Informasi

PPDB berbasis daring atau semi-daring perlu terus dioptimalkan agar proses pendaftaran berjalan efisien dan mengurangi potensi praktik manipulatif. SMP Negeri 1 Panyabungan sebaiknya mengembangkan sistem informasi PPDB yang lebih user-friendly, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka, seperti kuota tiap jalur, status pendaftaran, dan hasil seleksi. Transparansi informasi akan membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses PPDB.

Sekolah juga direkomendasikan untuk membuat portal khusus PPDB yang aktif dan interaktif, disertai FAQ (*frequently asked questions*), infografik, serta layanan pengaduan berbasis digital. Pelatihan bagi tenaga kependidikan dalam hal pengelolaan sistem daring juga penting agar pelayanan administrasi tetap maksimal walaupun dilakukan secara online.

iii. Peninjauan Ulang Skema Zonasi Berdasarkan Data Demografis Lokal

Salah satu tantangan utama sistem zonasi di SMP Negeri 1 Panyabungan adalah ketimpangan jumlah calon peserta didik dari berbagai wilayah, yang menyebabkan sekolah kesulitan menampung siswa dari luar zona padat. Rekomendasi penting adalah melakukan pemetaan ulang zonasi berdasarkan data demografis dan distribusi sekolah-sekolah di sekitarnya. Sekolah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal perlu menyusun zonasi yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan ketersediaan transportasi, akses jalan, dan kepadatan penduduk di zona tertentu.

Zonasi juga harus dikaji secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan sosial dan infrastruktur di wilayah Panyabungan. Pendekatan zonasi dinamis (dynamic zoning) perlu diuji coba, yakni dengan membuka ruang bagi siswa dari zona padat penduduk untuk dapat memilih sekolah di zona terdekat secara rasional, bukan hanya berdasarkan garis batas administratif.

iv. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan

Untuk mencegah kecurangan atau penyimpangan dalam PPDB, SMP Negeri 1 Panyabungan perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Sekolah dapat membentuk tim pengawas PPDB yang terdiri dari unsur guru, komite sekolah, dan perwakilan masyarakat. Tim ini bertugas untuk memantau setiap tahapan proses penerimaan dan menindaklanjuti laporan pelanggaran.

Selain itu, penguatan kerja sama dengan lembaga pengawas eksternal seperti Inspektorat Daerah dan Ombudsman juga penting agar pengawasan lebih objektif. Setiap laporan dari masyarakat perlu ditindaklanjuti secara transparan dan profesional, dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan responsif.

v. Pemerataan Kualitas Pendidikan Antar Sekolah

Masalah utama dalam implementasi PPDB zonasi adalah adanya ketimpangan kualitas antar sekolah. SMP Negeri 1 Panyabungan sebagai sekolah favorit sering menjadi tujuan utama siswa dari berbagai wilayah, yang memicu lonjakan pendaftar. Untuk mengurangi beban ini, pemerintah daerah perlu fokus pada pemerataan mutu pendidikan, seperti distribusi guru berkualitas, fasilitas belajar, dan program pengembangan siswa di seluruh sekolah negeri di Panyabungan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berorientasi pada sekolah favorit, melainkan memiliki keyakinan bahwa semua sekolah negeri memiliki kualitas pendidikan yang setara. Upaya ini harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui program afirmasi, peningkatan kapasitas guru, serta insentif bagi sekolah-sekolah non-favorit untuk terus berbenah.

Perbaikan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Panyabungan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari peningkatan sosialisasi dan transparansi, penguatan sistem digital, hingga evaluasi kebijakan zonasi yang lebih responsif terhadap kondisi lokal. Peran serta masyarakat, media, dan lembaga pengawas menjadi kunci

keberhasilan reformasi ini. Jika dikelola dengan baik, sistem PPDB dapat menjadi alat pemerataan akses dan mutu pendidikan di Panyabungan, bukan justru menjadi sumber ketimpangan baru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Panyabungan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun sosial. Permasalahan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pelatihan bagi panitia PPDB, ketidaksesuaian zonasi dengan kondisi geografis lokal, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat telah mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PPDB. Selain itu, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah ini tidak diimbangi dengan daya tampung yang memadai, yang menyebabkan tekanan dalam proses seleksi dan verifikasi data peserta.

Meskipun begitu, keterlibatan aktif stakeholder seperti kepala sekolah, Dinas Pendidikan, komite sekolah, masyarakat, dan media telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses PPDB. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan solusi yang meliputi penguatan sosialisasi kebijakan, optimalisasi sistem digital, evaluasi ulang zonasi berdasarkan data lokal, penguatan mekanisme pengawasan, serta pemerataan mutu pendidikan antar sekolah. Dengan pengelolaan PPDB yang lebih adaptif dan kontekstual, sekolah dapat menjamin akses pendidikan yang lebih merata, adil, dan profesional.

REFERENSI

- Ishak, D. C. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829>
- Aryanda, D. F. (2024). Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mengawal Kebijakan Pendidikan Kota Malang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(2), 65. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i2.1932>
- Gliselda Aurelia, D., & Ema Jumiati, I. (2023). Strategi Komunikasi Publik dalam Menanggapi Gelombang Misinformasi dan Disinformasi PPDB Online di Provinsi Banten. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 117–127.

<https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.5975>

- Haekal, T. M., Marzaniar, P., Azmi, K., Idris, M. I., & Luddin, F. (2024). Strategi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik. *EduCompassion: Jurnal Integrasi Pendidikan Islam Dan Global*, 01(02), 64–70.
- Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 70–82. <https://doi.org/10.21831/jk.v4i1.27007>
- Mahmud, Z., Noor, M., & Sutanto, A. (2023). Implementasi Manajemen Kepala Sekolah dalam Peningkatan Penerimaan Peserta Didik Baru di Smp Muhammadiyah 4 Metro. *POACE: Jurnal Program Studi Adminitrasi Pendidikan*, 3(2), 117–129. <https://doi.org/10.24127/poace.v3i2.2258>
- Mustaqimah, E., & Perawironegoro, D. (2024). Peran Kepala Sekolah Berbasis Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Jumlah Peserta Didik Baru. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 4(3), 317–329. <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/irsyaduna/article/view/1503/860>
- Parameswara, M. C., Iskandar, M. F., & Amelia, R. F. (2022). Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9570–9578.
- Parlina, D. (2020). *Peran Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD N 1 Pasar Banggi Rembang* (Issue 1603036063) [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. https://www.academia.edu/84665588/Peran_manajemen_hubungan_masyarakat_dalam_meningkatkan_pendidikan_SDN_1_pasar_Banggi_Rembang
- Prasetio, H. (2025). *Peran Komite Sekolah/Madrasah*. Gurusiana. <https://www.gurusiana.id/read/hariprasetio/article/peran-komite-sekolah-madrasah-3705741>
- Ratiningsih, R., Mulyanto, M., & Fatmasari, R. (2022). Pengaruh Peran Komite Sekolah dan Paguyuban Orang Tua Siswa terhadap Prestasi Sekolah Dasar di Kecamatan Karangsambung. *Dwija Cendekia: Jurnal Riset Pedagogik*, 6(2), 325. <https://doi.org/10.20961/jdc.v6i2.62244>
- Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Smp Di Kota Surabaya. *Publika*, 491–502. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p491-502>

- Suhendar, N., & Suartini, S. (2021). Keadilan Pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 60. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.838>
- Sujari. (2022). Manajemen Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Al-Miskawaih: Journal of Science Education*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.56436/mijose.v1i1.82>
- Sultoniyah, M. F., Rukajat, A., & Ramadhani, K. (2022). Manajemen Kepala Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPIT Istiqomah Global School Karawang Tahun Pelajaran 2022/2023. *As-Sabiqun*, 4(3), 527–547. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i3.1929>
- Vinalistyosari, R. C., Santoso, A., & Dewi, R. S. I. (2024). Dampak Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 6. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(1), 5546–5553. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/11476>
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Diana, S. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29–37. <https://journal.actual-insight.com/index.php/antropocene/article/view/20/4>
- Wijayanto, P. W., & Qana'a, M. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial sebagai Alat Promosi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 7(02), 179–193. <https://doi.org/10.24903/jam.v7i02.2291>